

# The Ideology of Susilo Bambang Yudoyono's (SBY) the Speech at the Fifteenth Anniversary of Democrat Party

Yusep Ahmadi F

STKIP Siliwangi Bandung, Indonesia  
yusep-ahmadi-f@stkipsiliwangi.ac.id

## Abstract

This paper is motivated by the sociopolitical situation of Indonesia that heats up in late 2016 and early 2017. The method of this research is qualitative and using Critical Discourse Analysis theory as data analysis tool. The formulation of this research problem is what are the linguistic tools used by Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) in launching his ideology as the leader of the Democrat party in the 15th demise of the Democratic Party's natalies and how SBY's ideology of Indonesian reality in late 2016 and early 2017 is considered full intrigue. The result of research shows that some linguistic tools such as transitivity, modalities, lexicalization, and euphemism have been used by SBY to criticize and reject the reality that happened. The reality that SBY highlighted is the government's policy or role related to some of the conflicts that have been and are happening in the society. It can be said that the ideology that criticizes the ongoing reality is in line with the background of the Democratic party which is often stated as a balancing party outside the government.

Key Word: Ideology, Susilo Bambang Yudoyono, Critical Discourse Analisis

## 1. Pendahuluan

Pidato Susilo Bambang Yudhoyono (Selanjutnya disebut SBY) pada Dies Natalis Partai Demokrat ke-15 yang juga bertepatan dengan rapimnas (rapat pimpinan nasional) di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2017). tidak terlepas dari konteks sosiopolitik Indonesia di Akhir tahun 2016 dan awal 2017. Akhir tahun 2016 telah terjadi peristiwa yang menjadi topik nasional, yakni kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Basuki Cahaya Purnama. Kasus yang sangat menyedot perhatian publik tersebut hingga menimbulkan gejolak di masyarakat terutama umat Islam yang merasa dinistakan agamanya. Pada puncaknya terjadi peristiwa aksi 212, yakni aksi unjuk rasa sekaligus doa bersama untuk menuntut keadilan atas kasus tersebut dan untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden RI ke-6 sekaligus pimpinan partai Demokrat. Partai demokrat sering menyatakan diri sebagai partai penyeimbang yang selalu mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat dan mendukung segala-kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro rakyat. Berkait hal itu, penelitian ini menemukan urgensinya karena pelacakan ideologi SBY pada pidato dies natalies partai demokrat akan memberikan gambaran yang jelas tentang ideologi dan posisi SBY terhadap realitas sosiopolitik Indonesia di rentang waktu akhir 2016 dan awal 2017.

Penelitian-penelitian analisis wacana kritis yang berkait politik di Indonesia sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti termasuk penulis sendiri yang sudah pernah meneliti dengan judul "Ideologi Iklan Partai Gerindra Dalam Wacana Pilpres 2014". Selain itu, ada beberapa penelitian serupa yang pernah diteliti oleh penulis diantaranya dengan judul Analisis Wacana Kritis: Ideologi Hizbut Tahir Indonesia Dalam Wacana Kenaikan Harga Bbm 2013 Di Buletin Al-Islam Yang Berjudul 'Menaikkan Harga BBM: Menaikkan Angka Kemiskinan'. Akan tetapi, penelitian mengenai ideologi SBY dalam konteks sosiopolitik di Indonesia khususnya di awal 2017 ini belum ada yang meneliti.

### *Rumusan Masalah*

1. Apa saja piranti-piranti atau fitur-fitur linguistik yang digunakan SBY dalam melancarkan ideologinya?
2. Bagaimana ideologi SBY dalam menyikapi realitas sosiopolitik di rentang waktu akhir 2016 hingga awal 2017?
3. Bagaimana konteks sosiopolitik yang melatarbelakangi pidato SBY dalam acara Dies Natalies Partai Demokrat ke-15?

Tujuan penelitian ini untuk:

1. Mendeskripsikan piranti-piranti kebahasaan yang digunakan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dalam melancarkan ideologinya sebagai pemimpin partai Demokrat pada dies natalies ke-15 partai Demokrat.
2. Mengetahui ideologi SBY dalam menyikapi realitas sosiopolitik Indonesia di rentang waktu akhir 2016 hingga awal 2017
3. Mengetahui Konteks Sosiopolitik yang melatarbelakangi pidato SBY dalam acara Dies Natalies Partai Demokrat ke-15.

## 2. Landasan Teori

### *Wacana dan Ideologi*

Wacana secara linguistik adalah satuan bahasa terlengkap dan tertinggi dalam hierarki gramatikal (Kridalaksana 1982 dalam Sinar, 2012:1). Di dalam wacana terdapat kesatuan dan kepaduan yang secara bersinergi membangun keutuhan bentuk dan makna. Sebagai bentuk bahasa terlengkap wacana mempunyai dimensi internal dan eksternal. Dimensi internal wacana seperti kata, frase, kalimat, koteks sedangkan dimensi eksternal wacana seperti praanggapan, implikatur dan konteks komunikasi. Secara umum wacana dalam dunia perpolitikan Indonesia telah menjadi subjek dan objek penelitian analisis wacana kritis di Indonesia. Berbagai dimensi internal wacana dapat ditelusuri dan dimaknai untuk mengetahui ideologi yang terkandung dalam sebuah wacana. Sementara itu, berkaitan dengan ideologi, Aiken (2002:2 dalam Ahmadi 2014) mengatakan bahwa ideologi dapat dipahami sebagai sistem sikap atau cara pandang terhadap sebuah realitas. Senada dengan itu, Lull (1998:1-2) juga menyatakan bahwa ideologi merupakan ungkapan yang mendeskripsikan nilai dan agenda publik dari bangsa, kelompok agama, kandidat dan pergerakan politik, organisasi bisnis, sekolah, serikat buruh, bahkan regu olahraga, dan orkes rock. Kemudian secara singkat Lull (1998 dalam Ahmadi, 2014) mengatakan bahwa "ideologi adalah sistem ide-ide yang diungkapkan dalam komunikasi.

Sementara itu, menurut Fairclough (dalam Jorgensen dan Philips, 2007: 139; dalam Ahmadi, 2014) menyoroti ideologi sebagai konstruksi makna yang memberikan kontribusi bagi pereproduksi dan transformasi hubungan-hubungan dominasi. Itu artinya, dalam sebuah wacana mengandung ideologi yang mengatur, menghubungkan dan memosisikan hal-hal tertentu dalam tatanan sosial tertentu.

### *Analisis Wacana Kritis*

Analisis wacana kritis merupakan sebuah metode atau pendekatan baru dalam penelitian ilmu-ilmu sosial budaya dalam meneliti dan memerikan fenomena-fenomena sosiokultural yang mengandung ketidakadilan, dominasi atau diskriminasi (Haryatmoko, 2016: 1-2). Dalam penelitian analisis wacana kritis (AWK) tersebut aspek analisis bahasa memerankan peran yang sangat penting karena bahasa sebagai data semiotik wajib ada dalam penelitian AWK. AWK yang diterapkan dalam penelitian ini adalah AWK model Fairclough, yang di dalamnya terdiri atas tiga level analisis, yakni analisis tekstual, analisis pemproduksi dan persebaran wacana, dan analisis konteks sosiobudaya (Eriyanto, 2009: 285-288). Sebagaimana diungkapkan Fairclough bahwa analisis tataran teks merupakan analisis level pertama dalam meneliti sebuah fenomena wacana sebagai konstruksi semiotika sosial (Santoso, 2012:70-71). Analisis teks menjadi kunci pertama untuk melihat ideologi sebuah wacana. Oleh karena itu, analisis dimensi teks perlu dilakukan secara komprehensif dan seksama. AWK bermanfaat sebagai model analisis yang akan memberikan informasi yang akurat dan seimbang tentang suatu wacana kepada masyarakat. Selain itu, dengan semangat emansipatoris, AWK juga memberantas segala bentuk kesenjangan, termasuk kesenjangan pengetahuan di masyarakat akibat kurangnya akses informasi.

## 3. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan metode kualitatif- deskriptif. Melalui metode tersebut data digambarkan, dipaparkan, dijelaskan dengan seksama dan terarah. Adapun teori atau pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data adalah teori analisis wacana kritis Fairclough. Data wacana dianalisis dari 3 aspek yakni, aspek teks kebahasaan, aspek pemproduksi wacana dan aspek konteks wacana. Sumber data didapat dari website partai demokrat <http://www.demokrat.or.id/2017/02/pidato-lengkap-sby-di-dies-natalis-partai-demokrat/>. Validasi data dengan teknik triangulasi. Pemilihan

sampel diambil dari berbagai data kebahasaan yang dinilai memiliki tendensi ideologis, data-data tersebut berupa kalimat-kalimat yang di dalamnya terdapat bentuk kebahasaan seperti ketransitifan, modalitas, eufemisme, dan leksikalisasi. Selain itu, data diambil juga dari berbagai informasi yang terdapat dari berbagai sumber literatur seperti buku dan berita media.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Hasil temuan data dianalisis baik secara yang bersifat teks (pidato) maupun data non teks pidato yakni berbagai informasi yang menunjang analisis data secara keseluruhan. Analisis data wacana pidato SBY ini dibagi menjadi tiga level, yakni pertama tingkat analisis teks, analisis praktik produksi wacana dan persebarannya, dan analisis konteks soibudaya. Analisis yang pertama dilakukan adalah analisis data teks. Analisis data teks merupakan deskripsi tentang teks yang kemudian dapat diinterpretasi sesuai jenis teks yang dianalisis. Adapun data-data teks yang dianalisis adalah berupa ketransitifan, modalitas, leksikalisasi, dan eufemisme. data-data tersebut dinilai sarat dengan makna ideologis yang dimanfaatkan SBY untuk mengkritik dan menolak realitas yang terjadi di masyarakat.

##### *Dimensi Teks*

Ketransitifan  
(Data 1)

*Tema besar pidato saya adalah Indonesia Untuk Semua. Indonesia For All. Dan saya akan soroti tiga topik penting, yaitu keadilan, kebhinnekaan dan kebebasan. Justice, diversity and freedom. Ketiga isu ini amat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketiga isu ini sekarang juga sedang menjadi perhatian publik yang luas.*

Data di atas terdapat bentuk kata transitif soroti. Hal itu menunjukkan bahwa SBY memberikan perhatian khusus kepada tiga hal, yakni keadilan, kebhinnekaan dan kebebasan. Perlu ditengarai bahwa mengapa ketiga hal tersebut menjadi fokus tema dalam pidato SBY karena pada saat itu isu-isu berkaitan tiga hal tersebut sedang menjadi perhatian publik pula.

(Data 2)

*Dulu, ketika membahas dasar-dasar Indonesia Merdeka, para pendiri republik memberikan perhatian sangat khusus atas tiga isu ini. Konstitusi kita, UUD 1945, juga memberikan tempat yang terhormat terhadap keadilan, kebhinnekaan dan kebebasan.*

Sejalan dengan Data 2 terdapat bentuk ketransitifan **memberikan perhatian**. Pada intinya bentuk ketransitifan ini merupakan repetisi dari bentuk data 1 yakni tentang tiga tema yang menjadi pokok pidato SBY.

(Data 3)

*Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar agar keadilan tegak, kebhinnekaan diwujudkan, dan kebebasan dijamin serta diberi ruang yang cukup. Namun, sejak Indonesia berdiri, dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain, dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain, tidak selalu mudah mewujudkan 3 hal besar ini.*

Pada Data 3 ditemukan bentuk ketransitifan yang menunjukkan bahwa negara diposisikan menjadi hal yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap tiga hal tadi. Dalam hal ini SBY membidik pemerintahan Jokowi sebagai representasi negara yang seharusnya melaksanakan dan mewujudkan tiga hal tersebut. Pernyataan tersebut juga mengindikasikan kekurangpuasan SBY terhadap pemerintah terhadap pelaksanaan keadilan hukum terutama kasus hukum yang sedang berkembang saat itu. Hal tersebut juga ditunjukkan dalam perkataan SBY berikutnya (pada data 6)

Gaya Eufemisme

(Data 5)

*Sehingga, jika dalam pidato ini saya mengangkat keresahan banyak kalangan tentang wajah keadilan dan kebebasan, dan dalam batas-batas tertentu juga kebhinnekaan kita, tidak berarti begitu saja saya menyalahkan negara dan pemerintah. Tidak berarti pemerintah alpa dan menyimpang.*

Data 5 dua kalimat-kalimat yang secara stilistika dapat dikatakan mengandung gaya eufemistik. Di satu sisi SBY sebagai pimpinan partai di luar pemerintah mengkritik kebijakan pemerintah dan di satu sisi lain pula SBY tidak ingin secara penuh menyalahkan pemerintah terkait ketidakstabilan keadaan sosiopolitik di Indonesia. Perkataan SBY secara substantif mengandung kritik namun disampaikan secara tidak langsung dan halus. Hal ini sesuai dengan karakter SBY dan partainya yang selalu

mengajak masyarakat agar selalu santun dalam menyatakan sikap, termasuk kritik terhadap pemerintah.

(Data 6)

*Yang saya sampaikan ini **anggaplah sebuah wake up call**, atau peringatan dini. Wake up call kepada para penyelenggara negara, dan juga kepada kita semua. Kita **mesti peduli**, bertanggung jawab dan melakukan sesuatu untuk kebaikan bangsa kita.*

Pada data di atas terdapat bentuk modalitas **anggaplah sebuah wake up call**. Dalam hal ini SBY menyatakan bahwa dia ada di posisi luar pemerintahan yang sedang memperingati pemerintah. Adanya peringatan tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah dianggap sedang kurang bertanggung jawab atau setidaknya tidak terlalu fokus pada keadilan/peristiwa hukum sedang bergejolak di masyarakat. Selanjutnya terdapat modalitas ajakan **mesti peduli ... untuk kebaikan bangsa kita**. Melalui modalitas tersebut SBY melancarkan kuasanya dengan cara mengajak seluruh elemen bangsa untuk peduli dan bertanggung jawab terhadap keadaan bangsa pada saat itu. Ajakan ini terlihat tendensius karena pada mula paragraf tersebut SBY telah menyorot kinerja penyelenggara negara atau pemerintah Jokowi yang dinilai abai atau tak cukup fokus menyelesaikan berbagai kasus keadilan/ hukum yang sedang bergejolak di masyarakat.

Modalitas

(Data 7)

*Menjadi kaya tentulah bukan kejahatan atau dosa. Asalkan, kekayaan itu diperoleh secara halal, tidak lalai membayar pajak, dan rajin berbagi dengan yang tidak mampu. Tetapi, bagaimanapun negara bersalah dan berdosa jika tidak memikirkan, tidak membantu dan tidak meningkatkan taraf hidup rakyat miskin. Inilah esensi dari keadilan sosial-ekonomi yang **harus kita tegakkan**.*

Pada Data 7 di atas SBY menggunakan modalitas **harus...** untuk menunjukkan kuasanya sebagai ketua partai besar. Dalam hal ini SBY memposisikan diri sebagai negarawan sekaligus pimpinan partai besar yang ada di luar pemerintahan. Selain itu, pernyataan di atas juga merepresentasikan ideologi SBY sebagai tokoh yang mengkritik dan mengajak pemerintah untuk selalu memikirkan rakyat dan menyejahterakan rakyat.

(Data 8)

*Negara **tidak boleh asyik dan terlena** dengan hukum-hukum pasar dan ajaran kapitalisme semata. Ingat, pasar bebas, ajaran neolib dan kapitalisme yang fundamental tidak peka dan tidak peduli terhadap mereka yang tersisih dan tertinggal. Negara tidak boleh hanya mengikuti kepentingan perusahaan bisnis multinasional dan liberalisasi perdagangan bebas, tanpa memikirkan dampak negatifnya bagi rakyat.*

Pada Data 8 pun ditemukan modalitas pada kalimat *Negara **tidak boleh asyik dan terlena** dengan hukum-hukum pasar ...* di sini SBY kembali menunjukkan kritiknya terhadap pemerintah.

(Data 9)

*Melepas harga-harga kebutuhan pokok mengikuti harga pasar semata, tanpa memperhatikan daya beli rakyat, **bukanlah pilihan yang bijak**. (...)*

Dalam Data 9 terdapat data makna modalitas yang secara makna sama dengan data sebelumnya. Bentuk modalitas **bukanlah pilihan bijak...** ditujukan kepada pemerintah. Larangan atau penegasian yang diutarakan SBY terhadap pemerintah dinilai sebagai bentuk kritik juga. Hal ini menunjukkan dalam pandangan SBY pemerintah telah masuk dan menyerahkan ekonomi kepada pasar dan hal itu sepenuhnya kurang bahkan tidak memihak pada kepentingan rakyat secara luas terutama kaum menengah ke bawah.

(Data 10)

*...**Pemerintah tak boleh** menyerahkan segalanya ke mekanisme pasar bebas. Intervensi pemerintah yang positif, proporsional dan diperlukan (necessary) tetaplah harus dilakukan.*

(Data 11)

*Bergabung ke aliansi kerja sama ekonomi yang ditawarkan negara-negara besar **haruslah berhati-hati**. Pemerintah **harus cermat** jika harus bergabung dalam kerja sama ekonomi yang mengikat dan terstruktur ketat, seperti Trans-Pacific Partnership (TPP). Sebab, kalau kita gegabah, tidak siap dan salah perhitungan, Indonesia akan sangat dirugikan.*

Pada Data 10 dan 11 juga SBY masih terus menyoroti kebijakan pemerintah berkait hal ekonomi. Di sini SBY terlihat terus mengkritik dan mengingatkan pemerintah. SBY tidak sepaham dengan pemerintah jika mengikuti alur kelompok-kelompok negara ekonomi dunia karena dinilai bisa merugikan ekonomi Indonesia. Dengan berbagai kritik dan imbauan yang dilancarkan SBY terhadap pemerintah Jokowi menunjukkan SBY memiliki kuasa yang cukup untuk memberikan kritik-kritik tersebut. Dapat dimaknai juga bahwa SBY memosisikan dirinya sebagai peminat parpol yang pernah berkuasa dan punya segenap pengetahuan dan pengalaman yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah Jokowi.

(Data 12)

*Porsi pembangunan untuk infrastruktur juga **harus berimbang** dengan pembangunan manusia. ... Pembengkakan utang negara yang sangat besar untuk kepentingan jangka pendek, termasuk infrastruktur, **sebaiknya dihindari**. Jumlah utang yang naik secara tajam akan meningkatkan beban rakyat di masa depan.*

Dua bentuk modalitas harus berimbang dan sebaiknya dihindari merupakan penggunaan modalitas yang dimanfaatkan SBY untuk mengimbau pemerintah. Imbauan ini pun terkesan eufemistik dengan adanya kata sebaiknya. Kesantunan SBY dalam menyatakan sikap dan kritik terhadap pemerintah juga terdapat dalam bentuk kebahasaan leksikalisasi. Berikut temuan data leksikalisasi yang digunakan SBY untuk mengkritik pemerintah dan realitas sosial yang ada saat ini.

Leksikalisasi

(Data 13)

*Adalah **tidak bermoral**, kalau di tengah gedung-gedung megah dan gemerlapannya kemewahan, jutaan rakyat tidurnya tidak nyenyak lantaran tidak cukup makan. Yang menjadi sasaran bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga **keadilan sosial** (social inclusion) dan terjaganya lingkungan dan sumber-sumber kehidupan. ...*

Pada Data 13 SBY menyoroti permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan keadilan. Bentuk leksikalisasi *tidak bermoral* menunjukkan sikap tegas SBY terkait masih adanya kesenjangan yang menganga di antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Sorotan terhadap keadilan sosial ini pun menyinggung kebijakan pemerintah yang terlalu fokus terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi mengabaikan pemerataan pertumbuhan ekonomi tersebut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang selalu naik tiap tahunnya akan tetapi itu tidak mewakili kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh. Di sini SBY seperti ingin mengatakan bahwa pemerintah harus membuat terobosan yang baru untuk meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

(Data 14)

*Rakyat merasakan betapa bersemangatnya penegak hukum menangani kasus 'menyebarkan kebencian' atau 'tindakan tidak menyenangkan' terhadap penguasa. Sebaliknya, jika yang menjadi korban atau yang pencari keadilan bukan dari lingkaran kekuasaan, **jalannya tidak selalu mudah**. Saya juga melihat respons negara dan penegak hukum yang datar ketika ada indikasi terjadinya penyadapan ilegal yang bermotifkan politik.*

Data 14 di atas terdapat data leksikalisasi *jalannya tidak mudah*, hal ini menunjukkan ideologi SBY yang mengkritik ketidakadilan pemerintah dalam menangani kasus hukum di masyarakat.

(Data 15)

*Tahun-tahun terakhir ini, media sosial juga menjadi sorotan publik. Jika ada seorang yang statement-nya dinilai tidak menyenangkan penguasa atau kolega penguasa, langsung dihajar oleh '**the invisible group**'. Sebuah kekuatan yang tidak kentara. Saya adalah salah satu korban dari 'the invisible group' yang bekerja bagaikan mesin penghancur itu.*

Pada data di atas terdapat bentuk leksikalisasi '**the invisible group**'. Istilah yang cukup menarik untuk dianalisis. Secara langsung dan frontal SBY menuduh bahwa di era pemerintahan Jokowi terdapat kelompok atau kekuatan yang melindungi penguasa dan para koleganya dari kritik masyarakat. SBY menilai pemerintah tidak boleh membiarkan kelompok tidak jelas tersebut merongrong dinamika masyarakat dengan pemerintahannya.

Ketransitifan-eufemistik

(Data 16)

*Karenanya saya **mendukung penuh** langkah-langkah Presiden Jokowi dan pemerintah, untuk mengatur dan menertibkan penyimpangan di media sosial ini.*

Pada kalimat ini secara eufemistik SBY kembali menurunkan tensi kritiknya dan menyatakan dukungannya terhadap pemerintah untuk menertibkan *the invisible group* tersebut.

(Data 17)

*Saya tetap berpendapat bahwa kasus hukum Saudara Basuki **bukanlah isu** kebhinnekaan, bukan isu SARA dan juga bukan isu NKRI. Namun, dalam perkembangannya seperti ada politisasi dan penggeseran dari isu aslinya....*

***Marilah kita hormati** proses penegakan hukum atas saudara Basuki yang kini tengah berlangsung.... Dengan niat baik saya ingin mengingatkan, **janganlah dibiarkan** terjadinya **benturan horisontal** di masyarakat kita. Sekecil apapun. Dulu, konflik komunal di Sampit, Poso dan Ambon, awalnya juga kecil....*

Beberapa pengalasan di atas ditemukan beberapa data modalitas seperti *bukanlah*, *marilah*, dan *janganlah*. dalam data di atas SBY menyoroti kasus Basuki Cahaya Purnama. Dalam hal ini SBY memposisikan diri sebagai pimpinan partai dan seorang negarawan yang mengajak rakyat untuk menyikapi kasus tersebut dengan bijak dan tidak dengan amarah. SBY pun menyoroti bahwa kasus Basuki atau Ahok tersebut telah banyak bergeser menjadi isu yang dipolitisasi. Oleh karena itu, sebagai pemimpin parpol SBY menunjukkan posisi dan sikapnya bahwa hal tersebut jangan dibesar-besarkan.

(Data 18)

*Tetapi, dalam realitasnya, rakyat tidak selalu anarkis dalam menyampaikan perasaan, aspirasi dan harapannya. **Membungkam dan melarang rakyat untuk menyampaikan kritik** dan protesnya, dengan alasan demi stabilitas politik, menurut saya terlalu berlebihan.*

Data di atas menunjukkan SBY kembali mengingatkan pemerintah agar lebih memberi kebebasan dan ruang bagi masyarakat untuk beraspirasi dan memberi kritik terhadap pemerintah.

(Data 19)

*Pertama, saya mengetahui hati para kader sakit, luka dan juga marah. Kenapa? Ya karena tak ada angin tak ada hujan Demokrat **difitnah** menggerakkan Aksi Damai 4 November 2016 yang lalu.*

Data di atas terdapat leksikalisasi *difitnah*. Hal itu menyoroti konflik yang diawali oleh kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahaya Purnama. SBY menyatakan banyak pihak yang menuduh dirinya dan Partai Demokrat melakukan dan memobilisasi aksi unjuk rasa 4 November 2016. Aksi damai unjuk rasa tersebut adalah aksi besar-besaran yang dilakukan sekelompok masyarakat berkaitan kasus dugaan penistaan agama. Hingga pada tanggal 2 Desember 2016 terjadi pula aksi serupayang lebih besar dan menimbulkan pro-kontra di masyarakat.

(Data 20)

*Sementara itu, Partai Demokrat konsisten untuk tetap berada di luar pemerintahan, seraya menjalankan peran dan tugas '**social and political control**'. Partai Demokrat memilih untuk menjaga kemerdekaan dan kemandiriannya, terlebih ketika tidak banyak yang mau dan berani bersuara, baik di parlemen maupun di arena publik.*

Dalam data 20 terdapat bentuk leksikalisasi *social and political control*. SBY secara jelas menyatakan dirinya dan partainya berada di luar pemerintahan. Posisinya tersebut diklaim memiliki peran sebagai penyeimbang atau pengontrol pemerintahan. Secara ideologi SBY akan selalu menjadi tokoh yang mengontrol stabilitas sosialpolitik di luar pemerintah. Terlihat dari berbagai pernyataan di pidatonya ini SBY lebih banyak mengkritik pemerintah walaupun ada jg mendukung langkah yang dilakukan pemerintah.

(Data 21)

*Sebagai seorang **purnawirawan senior, dan selaku mantan Presiden**, saya tidak ingin TNI, Polri dan BIN bertindak salah serta mengkhianati sumpahnya sebagai bhayangkari negara.*

Terdapat bentuk leksikalisasi *purnawirawan senior* dan *selaku mantan presiden* pada data 20. Melalui leksikalisasi tersebut SBY menunjukkan kuasanya. Kuasa yang ditunjukkannya tersebut untuk memengaruhi khlayak bahwasannya saya merupakan orang berpengaruh di negeri ini. Secara luas apa yang dikatakannya harus menjadi pedoman dan harus dipertimbangkan bagi kehidupan bernegara dan berbangsa. SBY dalam hal ini menyoroti TNI, Polri dan BIN yang banyak dinilai masyarakat sudah tidak netral dalam mengarahi tugasnya. Tiga lembaga negara tersebut oleh masyarakat sering diopinikan sudah masuk ke ranah politik praktis dan memihak kelompok-kelompok tertentu khususnya berkaitan dengan masalah sosiopolitik-ekonomi. SBY di sini memposisikan diri sebagai senior dan mantan presiden yang mengingatkan ketiga lembaga negara tersebut untuk menjalankan tugas sesuai koridornya.

(Data 22)

*Karenanya, para petinggi TNI, Polri dan BIN, **janganlah tergoda** oleh kekuasaan sesaat.*

Pada data di atas, melalui modalitas *janganlah* SBY kembali mengingatkan TNI, Polri dan BIN untuk tidak terlibat dalam politik praktis atau memihak golongan-golongan tertentu.

Berdasarkan temuan dan analisis data teks di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa piranti linguistik seperti *ketransitifan*, *modalitas*, *leksikalisasi*, dan *eufemisme* telah dimanfaatkan SBY untuk mengkritik dan menolak realitas yang terjadi sambil sesekali memberi saran kepada pemerintah agar saran tersebut menjadi solusi yang dapat dipertimbangkan. Bentuk ketransitifan secara fungsional dapat menunjukkan posisi subjek dan objek dalam sebuah realitas. Melalui ketransitifan tersebut sebuah kelompok termasuk pemerintah atau sebuah peristiwa dapat diposisikan dan direpresentasikan dalam citra tertentu. Dalam hal ini pemerintah oleh SBY selalu diposisikan sebagai kelompok yang paling bertanggung jawab atas berbagai permasalahan terutama tiga masalah yang disoroti, yakni keadilan, kebinekaan dan keadilan.

Sementara itu, piranti *modalitas dimanfaatkan* untuk menunjukkan sikap-ideologi secara langsung terhadap realitas yang disoroti. Ditemukan modalitas-modalitas keharusan, ajakan, imbauan, dan penyaranan yang direalisasikan dalam bentuk seperti, *harus*, *tidak boleh*, *janganlah*, *marilah*, *sebaiknya*. Penggunaan modalitas tersebut memperlihatkan kuasanya sebagai tokoh atau negarawan yang pantas untuk memberikan kritik dan saran terhadap pemerintah. Selain itu bentuk leksikalisasi dan eufemisme juga dimanfaatkan untuk menilai dan merepresentasikan berbagai permasalahan yang disoroti SBY. Terdapat leksikalisasi yang bersifat lugas namun ada juga beberapa bentuk leksikalisasi yang terkesan eufemistik seperti *the invisible group* dan *wake up call*.

#### *Dimensi Pemroduksian Wacana dan Pendistribusian Wacana*

Wacana ini diproduksi oleh SBY sendiri hal itu dapat yakini karena pidato tersebut adalah pidato dari Ketua Umum Partai Demokrat, yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Setidaknya berbagai konsep dan substansi pidato pasti datang dari SBY. Partai demokrat sebagai lembaga yang memproduksi dan menyebarkan wacana ini merupakan partai politik yang pernah berkuasa selama dua periode antara tahun 2004 sampai 2014. Dapat dikatakan partai Demokrat adalah partai besar yang lahir di zaman reformasi.

Susilo Bambang Yudhoyono adalah mantan Presiden RI yang lahir di Pacitan 9 September 1949. Dalam masa kariernya di dunia militer dia adalah lulusan terbaik AKABRI tahun 1973 dan menerima penghargaan Lencana Adhi Masaya dari presiden Soeharto. Karier Militernya cemerlang, mulai dari menjabat Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad hingga menjadi Kepala Staf Teritorial (Kaster) ABRI (Hariwijaya, 2009). Hingga pada akhirnya SBY menjadi pimpinan Partai Demokrat dan mengantarkannya menjadi Presiden Republik Indonesia ke-6 selama 2 periode. Oleh karena itu, berbagai sikap dan ideologi SBY yang terrepresentasi dalam data teks di atas tidak terlepas dari konteks penghasil teks yang seorang negarawan dan jenderal purnawirawan. Yang paling menonjol dari data teks tersebut adalah data modalitas yang secara makna SBY selalu menunjukkan sikap menegasi, mengajak, dan mengkritik dengan tegas terhadap setiap realitas yang sedang terjadi terutama menyoroti peran dan kebijakan pemerintah terhadap berbagai permasalahan masyarakat saat ini.

Sementara itu, dalam hal pendistribusian teks, wacana pidato ini pertama kali disebar secara terbatas yakni hanya pada kader partai demokrat pada acara rapimnas dan dies natalis partai demokrat ke-15 di Jakarta. Akan tetapi, wacana ini pun dapat diakses secara nasional karena terdapat di web resmi partai demokrat dengan alamat <http://www.demokrat.or.id/2017/02/pidato-lengkap-sby-di-dies-natalis-partai-demokrat/>. Dengan disimpannya naskah pidato SBY pada acara rapimnas dan dies natalis ke-15 tersebut menunjukkan bahwa hal ini merupakan strategi partai demokrat dan SBY untuk menyebarkan ideologinya secara luas. Dan sebagai partai yang besar tentu saja setiap ideologi dan pandangan partai atau pimpinan partai harus selalu dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

#### *Dimensi Konteks Sosiobudaya*

Analisis konteks sosiobudaya tidak terlepas dari analisis dimensi teks dan analisis praktik wacana (analisis pemroduksian wacana dan penyebaran wacana). Terlihat berdasarkan analisis dua dimensi sebelumnya SBY melancarkan praktik sosial berupa pelancaran ideologi kritik terhadap realitas, terutama kritik terhadap pemerintahan Jokowi yang dinilai memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat. Sementara itu, situasi sosial yang sedang terjadi di masyarakat pada saat wacana pidato ini dibacakan adalah ketika negara dan bangsa Indonesia mengalami gejolak sosiopolitik. Gejolak tersebut terutama terkait dengan pilkada serentak khususnya pilkada Jakarta selain itu kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahaya Purnama pun menjadi konteks situasi sosiopolitik yang sangat melatarbelakangi pidatonya terbukti SBY beberapa kali menyebut kasustersebut. Kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahaya Purnama tersebut telah menimbulkan aksi besar-besaran oleh masyarakat baik yang pro maupun yang kontra terhadap kasus

tersebut. Selain itu, rumah SBY pun pernah didatangi pengunjung rasa yang sedikit banyak akibat situasi sosiopolitik yang sedang memanas.

Pidato ini dideklarasikan pada tanggal 7 Februari 2017 di Jakarta. Sebagaimana jadwal rentetan tahapan pilkada DKI yang dimulai dari Agustus 2016 sampai pemungutan suara pada bulan Februari (Kompas 2017). Konteks sosial ini menentukan isi pidato SBY tersebut. Sebagaimana diberitakan di berbagai media (Kompas, Beritasatu.com, bbc.com) di rentang waktu tersebut telah terjadi konflik horizontal antarmasyarakat terutama berkaitan dengan kasus sosiopolitik seperti yang disinggung di atas. Banyak terjadi unjuk rasa besar-besaran, banyak perdebatan di kalangan pengamat hal tersebut membuat keresahan sosial dan ketidakstabilan sosiopolitik negara Indonesia. Dari kasus yang dapat dibilang sederhana tersebut menjadi kasus nasional bahkan internasional dan dari isu SARA begeser menjadi kasus yang dipolitisasi untuk kepentingan pemilu daerah Jakarta. Kritik yang disampaikan SBY dalam pidatonya tersebut lebih menyoroti kebijakan dan peran pemerintah dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi dimasyarakat terutama masalah sosiopolitik yang ditengarai berawal dari kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahaya Purnama.

## 5. Simpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Hasil analisis teks menunjukkan bahwa beberapa piranti kebahasaan seperti ketransitifan, modalitas, leksikalisasi, dan eufemisme telah dimanfaatkan SBY untuk mengkritik dan menolak realitas yang sedang terjadi di rentang waktu akhir 2016 hingga Awal 2017. Terutama realitas yang disorot SBY adalah kebijakan atau peran pemerintah terkait beberapa konflik yang sudah dan sedang terjadi di masyarakat yang dinilai kurang optimal dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Konteks sosiobudaya yang melatarbelakangi pidato SBY pada acara dies Natalies ke-15 Partai Demokrat adalah ketika keadaan sosiopolitik Indonesia sedang bergejolak. Hal tersebut akibat dari pandangan pro-kontra di masyarakat terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahaya Purnama. Selain itu, secara konteks institusional apa yang disampaikan SBY dalam pidatonya sejalan dengan latar belakang partai Demokrat yang sering dinyatakan sebagai partai penyeimbang yang berada di luar pemerintahan.

## 6. Daftar Pusaka

- Ahmadi F, Yusep. (2014). Ideologi Iklan Partai Gerindra Dalam Wacana Pilpres 2014. Prosiding Seminar Tahunan Linguistik. Bandung Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ahmadi F, Yusep. (2015). "Analisis Wacana Kritis: Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Wacana Kenaikan Harga Bbm 2013 Di Buletin Al-Islam Yang Berjudul 'Menaikkan Harga Bbm: Menaikkan Angka Kemiskinan' ". *Jurnal Metalingua: Jurnal Penelitian Bahasa*. Vol. 12 No. 2. hlm. 253-268.
- Hariwijaya, M & Sugiharto M. Toto. (2009). *9 Rahasia Sukses SBY*. Yogyakarta. Paradigma Indonesia.
- Haryatmoko. (2016). *Critical discourse analysis (Analisis Wacana Kritis): Landasan teori, metodologi dan penerapan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sinar, Tengku Silvana. (2012). *Teori dan analisis wacana: pendekatan linguistik sistemik*. Medan: Penerbit Mitra.
- Santoso, Anang. 2003. *Bahasa Politik Pasca Orde Baru*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

## Sumber Online

- Ini Tahapan Pelaksanaan Pilkada DKI 2017, Waktu Pendaftaran Diundur 2 Hari  
<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/06/08250871/ini.tahapan.pelaksanaan.pilkada.dki.2017.waktu.pendaftaran.diundur.2.hari>
- Aktivis 98: Islam Cinta Damai, Hindari Konflik Horizontal Demo Tangkap Ahok  
<http://www.beritaasatu.com/22495/26/10/2016/aktivis-98-islam-cinta-damai-hindari-konflik-horizontal-demo-tangkap-ahok.html>
- Proses Hukum Dinilai Jadi Solusi Atasi Konflik Terkait Kasus Ahok  
<http://nasional.kompas.com/read/2016/11/10/04010061/proses.hukum.dinilai.jadi.solusi.atasi.konflik.terkait.kasus.ahok>
- Warga keturunan Tionghoa terbelah soal Ahok <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38381155>